

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) maka pada tatanan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu implementasi untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab maka setiap instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan amanat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2019, merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kota Bima. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga .

LKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkap target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

## **1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM**

### **1.2.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan. Langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bima melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima (DPPKB), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019. LKIP diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban Dinas PP dan KB Kota Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta atas penggunaan berbagai sumber daya Pemerintah. Sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dalam melaksanakan misinya.

### **1.2.2 Landasan Hukum**

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188)
- Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) , dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, untuk uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan , uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman KesehatanReproduksiRemaja;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota
- PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Derah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 310)

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bimadan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bimaterdiri dari :

## **1. Kepala Dinas.**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan Pelayanan KB;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;

2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. pengelolaan urusan ASN; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Yakni :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

### **3. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
5. pelaksanaan Pelayanan KB;
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.

#### **4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

- 1.Seksi advokasi dan penggerakan;
- 2.Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- 3.Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

## 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :

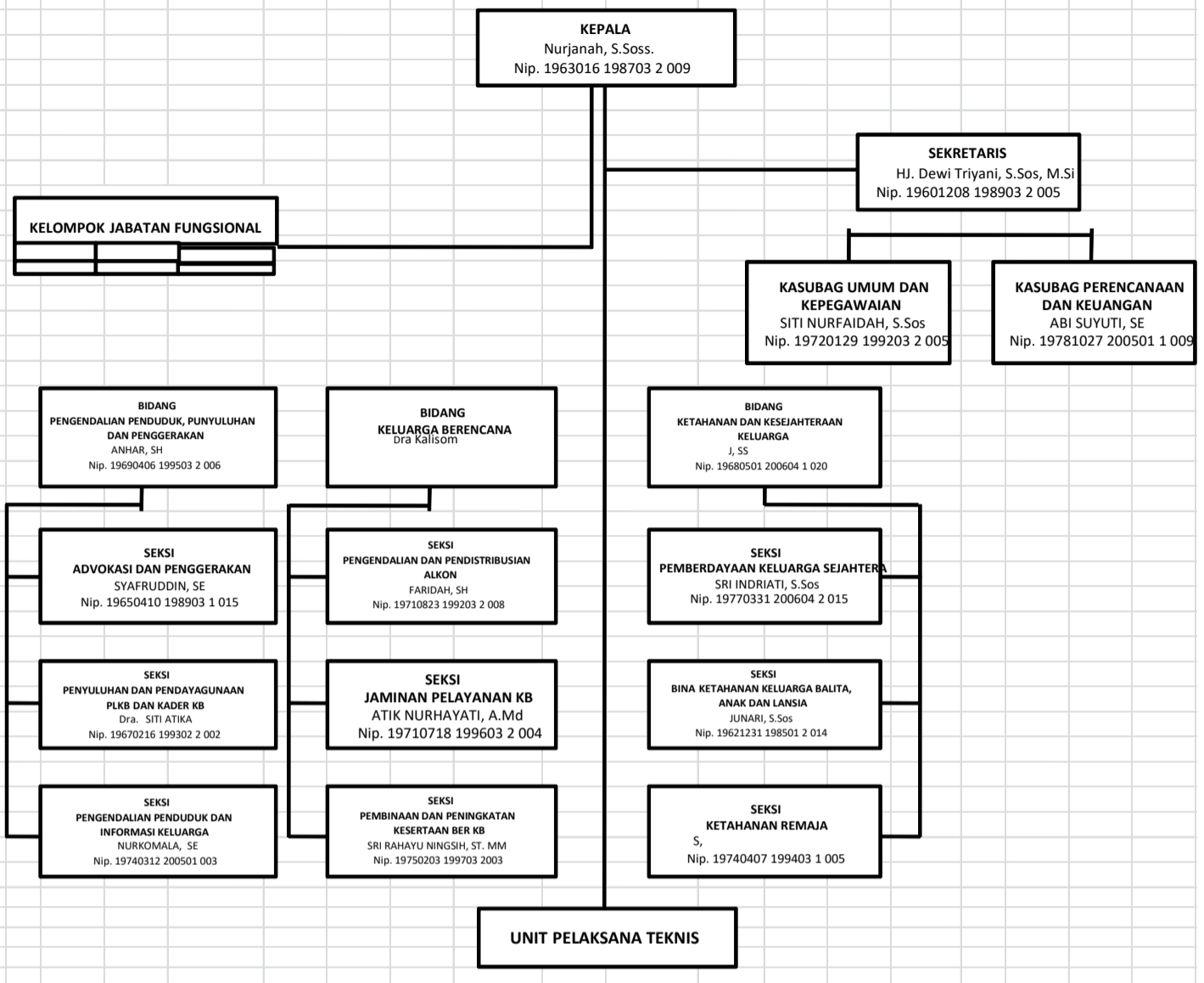
1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

1. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Staf

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**





#### **1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang besar dalam hal pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima menemui kendala yang tidak sedikit. Kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas PPKB Tahun 2018 – 2023. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKB. Isu strategis tersebut, antara lain :

- Bagaimana menekan Laju pertumbuhan penduduk (Total Fertility Rate/TFR) di wilayah kota Bima
- Menekan angka Unmet need yang masih tinggi
- Menekan angka putus pake (DO) akseptor KB yang masih tinggi
- Masih tingginya cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 Tahun
- Kualitas data dan informasi keluarga belum akurat
- bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana di kota Bima
- upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih berada dibawah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umumpenyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Dalam penyelesaian mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara lain penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun tujuan, sasaran jangka menengah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disajikan dalam table berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah DPPKB Kota Bima**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahunan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pelayanan kb dasar	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,27	1,25	1,24	1,22	1,20

		Meningkatnya peserta keluarga berencana aktif	Total Fertility Rate (TFR)	2,28%	2,27%	2,25%	2,20%	2,10%
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,5	2,3	2	2
			Ratio Akseptor KB	12,15%	15,5%	17,755	20,5%	25,00%
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	65,00%	65,00%	68,00%	69,00%	69,00%
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000	39/1000	38/1000	37/1000	36/1000
			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	22%	20%	18%	17%	15%
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,23%	7,23%	7,15%	06,35	05,00%
			Presentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	51,25%	52,00%	53,00%	54,00%	55,00%
			Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	91,59%	93,50%	95,50%	95,67%	96,00%
2	Meningkatkan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84,90%	85,00%	85,50%	85,70 %	86,00%
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	86,50%	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	80,00%	80,50%	81,00%	82,00%	82,50%

			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	20,00%	40,00%	50,00%	75,00%	80,00%
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	20%	22%	24%	27%	30%
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88,90%	90,00%	90,50%	90,80%	91,00%
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memeberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0%	0%	0%	0%	0%
			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

			Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang anak	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata usia kawin pertama wanita	22,30	22,50	22,95	23,30	23,70

## 2.2 Penjelasan Indikator Utama Tahun 2019

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapaisasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2017-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi DPPKB Kota Bima..

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.2. Formulasi penjelasan Indikator Kerja Utama DPPKB Kota Bima**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	<b>Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 taun)	2,28	Jumlah Kelahiran Hidup laki2 dan perempuan hingga akhir masa reproduksi
2.	<b>Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Akti</b>	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	65,00%	Jumlah PUS KB aktif dan KB baru di bagi Jumlah PUS X 100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000	Jumlah kelahirankelompok umur dibagi jumlah wanita usia subur (15-49 Tahun x1000
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	8,23%	Jumlah PUS yang ingin ber KB tapi tak terlayani (lat + tial) di bagi jumlah PUS (15-49THN) X 100%
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,25%	Jumlah PUS ber- KB MKJP dibagi jumlah PUS ber KB aktif X 100%

### 2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima tahun 2019 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2019.

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Terkendalijnya laju pertumbuhan penduduk</b>	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,28%
2	<b>Meningkatnya peserta keluarga berencana aktif</b>	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	65,00%
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	8,23%
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,25%

## 2.4. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian/Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bima dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,28
2.	Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	2	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	65,00%
		3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000
		4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	8,23%
		5	Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,25%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	669.962.400	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.194.392.700	
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur	169.732.000	
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.282.600	
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	113.051.100	
6 Program Keluarga Berencana	2.236.552.400	
7 Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	296.979.900	
8 Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan KB	238.718.500	

## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Pengukuran Kinerja dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian sasaran dilakukandengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yangtelahditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

1. Indikator bermakna positif , artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecilrealisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Urutan	Rentang capaian	Kategori capaian
I	>100%	Sangat berhasil
II	91%-100%	Berhasil
III	81%-90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

### 3.1 Capaian Kinerja organisasi



### 3.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran Dinas

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran/ realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Sasaran strategis, indikator kinerja, target danrealisasi capaian kinerja Tahun 2019**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,28%	2,24 %	101,75
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	2	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	65,00%	68,65%	105,61
	3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000	36,72/1000	105,85
	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	8,23%	9,86%	80,20
	5	Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,25 %	53,88%	105,13

### 3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Dinas

#### 3.1.2.1 Sasaran 1 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

**Indikator :Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)**

**Tabel 3.2. Capaian Sasaran Stragis 1**

Sasaran Strategis 1		Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,28%	2.24%	101,75

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Yakni angka kelahiran total dibandingkan dengan jumlah total Wanita Usia Subur sebagai mana tergambar dalam table berikut :

**Tabel 3.3 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah kelahiran	Jumlah Keluarga	Rata-rata jumlah Anak Per Keluarga
1	Rasanae Timur	10.067	4.579	2.20
2	Rasanae Barat	18.399	7.418	2.35
3	Asakota	16.230	6.512	2.49
4	Raba	25.138	9.497	2.33
5	Mpunda	15.613	6.451	2.42
<b>Jumlah Kota Bima</b>		85.447	34.457	2.36

**Tabel 3.4. Jumlah ASFR Tahun 2019**

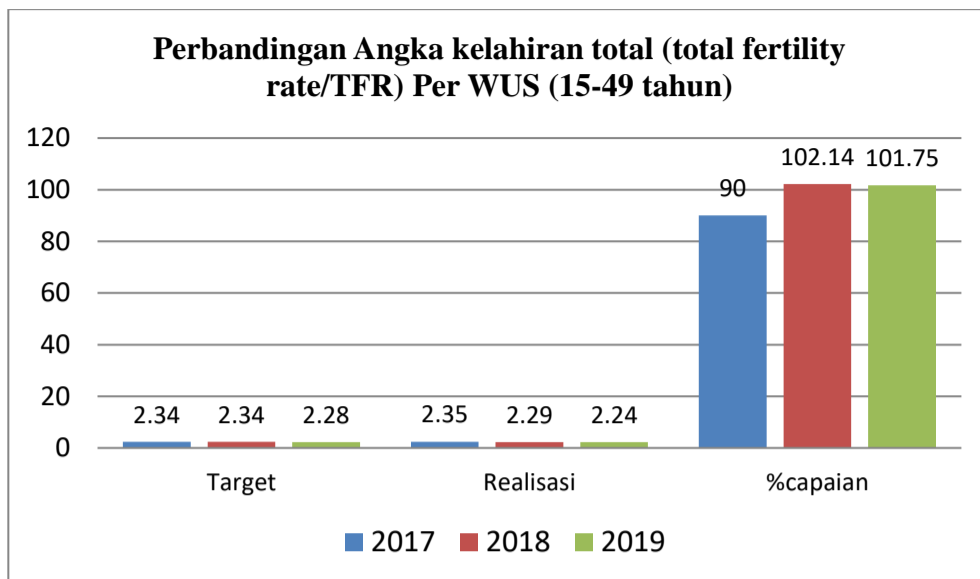
No	Kecamatan	Usia 15-19	Jumlah WUS
1	Rasanae Timur	146	8.078
2	Rasanae Barat	180	4.355
3	Asakota	273	6.875
4	Raba	437	11.382
5	Mpunda	360	7.318
<b>Jumlah Kota Bima</b>		1.396	38.008

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Angka Kelahiran total (TFR) Per WUS yang di targetkan **2.28%** realisasi **2.24%** atau 101,75 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah kelahiran sebesar 85,447 jiwa dari 1000 kelahiran hidup dengan jumlah WUS (15-49 tahun) sebesar 38.008 orang. tfr sebesar **2.24%** berarti wanita usia 15-49 thn secara rata2 mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB dalam Pencapaian Sasaran Strategis I**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34	2,35	90,00	2,34	2,29	102,14	2,28	2,24	101,75



Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran strategis I indicator angka kelahiran total (TFR) pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan capaian dibanding tahun 2018. Namun Pencapaian TFR 2019 untuk Kota Bima telah melampaui target propinsi NTB sebesar 2,3% dan nasional untuk TFR perwus dalam RPJM 2015-2019 sebesar 2,5%. Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun rencanaan Jangka menengah (2023)	Realisasi sampai tahun 2019	% Capaian
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,28%	2,24 %	101,75%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2019, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7. Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I**

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Terkendalnya	Program Pengendalian Penduduk,	<b>238.718.500</b>

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Laju Pertumbuhan Penduduk	Penyuluhan dan Penggerakkan KB	
	pembentukan masyarakat peduli kb	58.748.500
	monitoring kegiatan pendataan keluarga	7.951.600
	operasional kader Pendata Keluarga	29.906.400
	orientasi kader pendata keluarga	35.371.000

### 3.1.2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Capaian Sasaran Strategis II**

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	1	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	65,00%	68,65%	105,61
	2	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	39/1000	36,72/1000	105,85
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	8,23%	9,86%	80,20
	4	Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,25 %	53,88%	105,13

### 3.1.2.3 Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu)

Tingkat capaian kinerja untuk indicator persentase pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode kurun waktu tertentu yang ditargetkan sebesar 65,00% terealisasi sebesar 68,65% atau 105,61 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah pemakaian kontrasepsi KB aktif sejumlah 18.138 Akseptor dan peserta KB baru sejumlah 2.570 akseptor, sedangkan total PUS keseluruhan sebesar 30.164 orang sebagaimana tergambar dalam table berikut :

**Tabel 3.9. Data pemakaian Kontrasepsi**

NO	KECAMATAN	PUS	PER MIX KONTRASEPSI	JUMLAH
----	-----------	-----	---------------------	--------

			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	RasanaE Barat	6.493	820	149	9	136	705	1.418	216	3.453
2	RasanaE Timur	4.170	717	182	15	33	851	820	165	2.783
3	Asakota	6.410	906	290	14	250	790	1.185	317	3.752
4	R a b a	7.398	1.557	487	16	171	994	1.376	142	4.743
5	Mpunda	5.693	1.191	127	10	93	654	955	377	3.407
<b>KOTA BIMA</b>		<b>30.164</b>	<b>5.191</b>	<b>1.235</b>	<b>64</b>	<b>683</b>	<b>3.994</b>	<b>5.754</b>	<b>1.217</b>	<b>18.138</b>

Pencapaian kinerja indikator presentase pemakaian kontrasepsi CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 51,32% ( 12.054 Akseptor dan 23.486 peserta KB Aktif).

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB**  
**dalam Pencapaian Sasaran Strategis II**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	61,00%	60,00%	90,00%	62,00%	62,00%	100%	65,00%	68,65%	105,61%

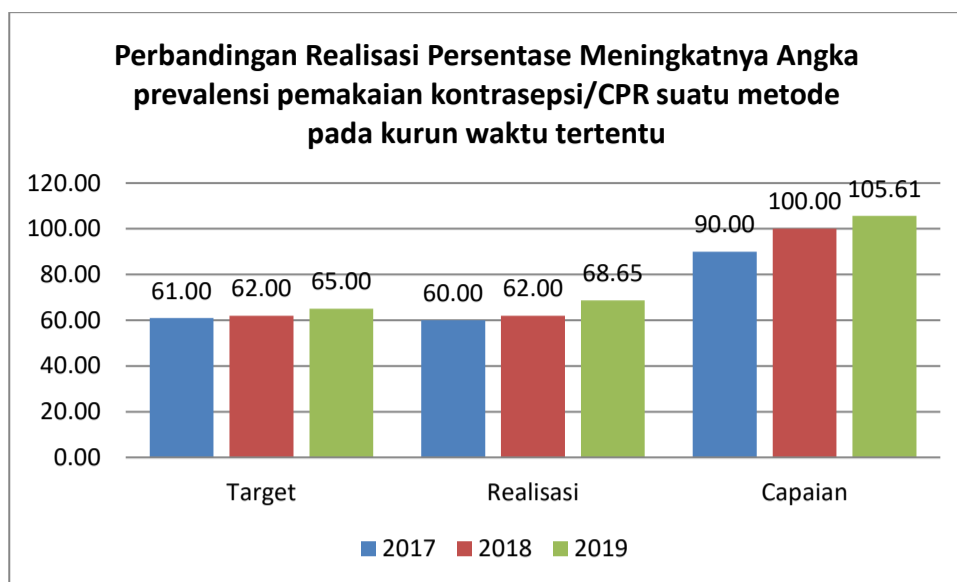


Table dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran strategis II Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu pada tahun 2019 mengalami peningkatan capaian sebesar 68,65 % dari target 65,00 Perse CPR tahun 2018 yang hanya mencapai 62 %.

Namun Pencapaian Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu 2019 untuk Kota Bima telah melampaui target nasional dalam RPJM 2015-2019 sebesar 61,3%

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.11.**

**Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2023)	Realisasi sampai tahun 2019	% Capaian
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	Meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/CPR suatu metode pada kurun waktu tertentu	69,000%	68,65 %	99,50

#### 3.1.2.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun

Tingkat capaian kinerja untuk indikator presentase angkakelahiran remaja (perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR15-19) yang ditargetkan sebesar 39/1000, terealisasi sebesar

36,72 /1000 dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah kelahiran remaja kelompok umur 15-19 tahun ditahun 2019 adalah sebesar 1.396 kelahiran dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk atau wanita usia subur sebesar 38.008 orang sebagaimana terlihat pada table dibawah ini

**Table 3.12. Kelahiran Kelompok Umur**

No	Kecamatan	Usia 15-19	Jumlah WUS
1	Rasanae Timur	146	8.078
2	Rasanae Barat	180	4.355
3	Asakota	273	6.875
4	Raba	437	11.382
5	Mpunda	360	7.318
<b>Jumlah Kota Bima</b>		1.396	38.008

### 3.1.2.5 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 8,23% realisasi 9,86 % atau 80,20% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 2.975 orang Akseptor terdiri dari Jumlah Ingin Anak Ditunda (IAD) 1.591 Akseptor dan Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 1.381 Akseptor.dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 30.164 (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/19),

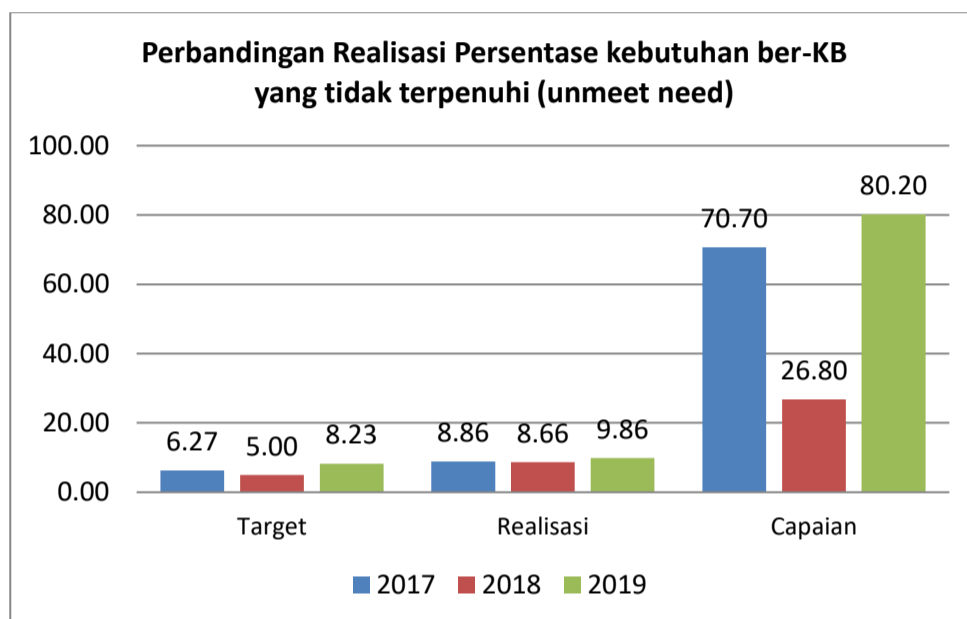
**Tabel 3.13. Jumlah Unmeet Need**

Kecamatan	Jumlah PUS	UNMET NEED		
		Hamil	Jumlah	%
RasanaE Barat	6.493	328	1.010	15,56
RasanaE Timur	4.170	100	293	7,03
Asakota	6.410	138	846	13,20
R a b a	7.398	330	376	5,08
Mpunda	5.693	84	450	7,90
<b>TOTAL</b>	<b>30.164</b>	<b>980</b>	<b>2.975</b>	<b>9,86</b>

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis II untuk indicator unmet need pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.14.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja DPPKB**  
**dalam Pencapaian Sasaran Strategis II**

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	6.27%	8,86%	70,77%	5,0%	8,66%	26,00%	65,00%	68,65%	105,61%



Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 tingkat capaian indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,86%., sedangkan target nasional dalam RPJM 2015-2019 adalah sebesar 9,91 %. artinya untuk target unmet need kota Bima telah melampaui target nasional

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun rencanaan Jangka menengah (2023)	Realisasi sampai tahun 2019	% Capaian
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	2,28%	2,24 %	101,75%

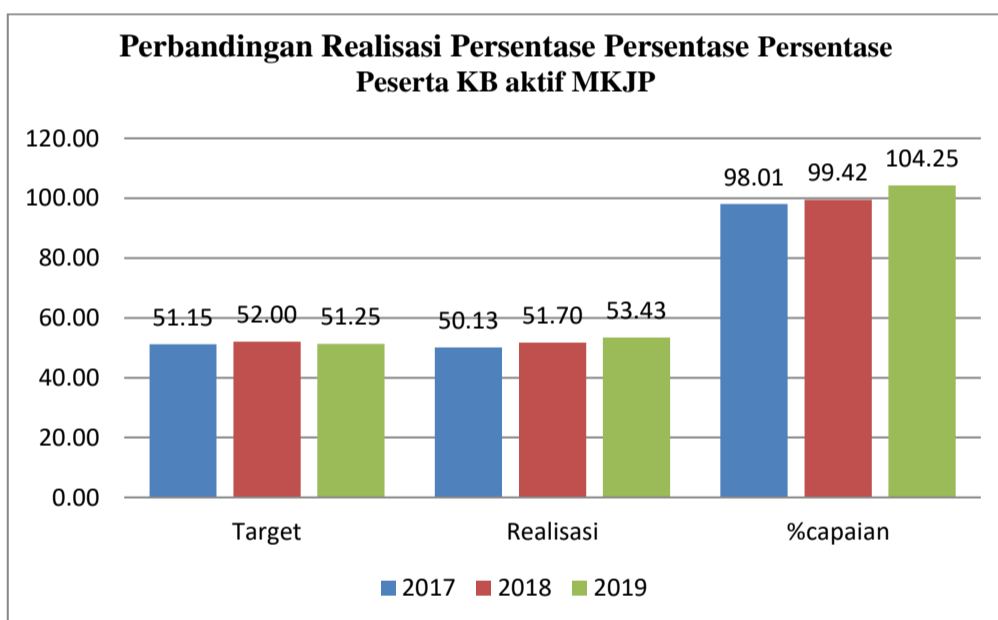


### 3.1.2.6 Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB aktif MKJP yang ditargetkan 51,25 % realisasi 53,43 % atau 104,25% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB MKJP 12.817 Akseptor dengan jumlah KB aktif 23.987 Akseptor sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

**Tabel.3.17. PresentasePeserta KB Aktif MKJP**

NO	KECAMATAN	PUS	KATEGORI		JUMLAH KB AKTIF
			MKJP	NON MKJP	
1	RasanaE Barat	6.493	2.328	2.414	4.596
2	RasanaE Timur	4.170	2.093	1.423	3.593
3	Asakota	6.410	2.370	2.747	5.106
4	R a b a	7.398	3.346	3.212	5.759
5	Mpunda	5.693	2.680	2.170	4.933
<b>KOTA BIMA</b>		<b>30.164</b>	<b>12.817</b>	<b>11.966</b>	<b>23.987</b>



Pencapaian peserta KB aktif MKJP tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2018 sebesar 51,70 % . (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/19), namun dibandingkan dengan target nasional, target peserta KB aktif kota Bima telah melampaui target nasional sebesar 23,01%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2018-2023 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**.Tabel 3.18.**

**Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah**

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun rencanaan Jangka menengah (2023)	Realisasi sampai tahun 2019	% Capaian
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif	Peserta KB aktif MKJP	60,00%	53,43%	89.05%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II tersebut, selama tahun 2019, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatanyang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.19.**

**Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran StrategisII**

Sasaran Strategis II	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>2.236.552.400</b>
	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	226.342.700
	Pelayanan KIE	340.933.500
	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	20.380.000
	promosi pelayanan khiba	0
	pembinaan keluarga berencana	47.071.200
	rapat kerja daerah program keluarga berencana	25.000.000
	pelayanan konseling kb	1.471.973.000
	pengadaan/penyediaan sarana pelayanan kb	104.852.000

**3.1.3 Capaian Kinerja Eselon III dan Eselon IV**

Dinas Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas terdiri dari tiga bidang dan secretariat, berikut akan ditampilkan capaian kinerja eselon III dan eselon IV berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan tahun 2019.

Tabel. 3.20. Capaian Kinerja Eselon III dan EselonIV Bidang P4KB

BIDANG	Program /kegiatan	Indikator prog/keg	Target	Capaian	% Capaian
Kabid p4kb	<b>Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan KB</b>	cakupan masyarakat peduli KB (Kelompok Kegiatan KB, PPKBD dan Sub PPKBD)	80%	80 %	100 %
Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga	monitoring kegiatan pendataan keluarga	Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi prog.KB	80%	80%	100%
	operasional kader Pendata Keluarga	terlaksananya pembayaran pengganti uang operasional Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	100%	100%	100%
	orientasi kader pendata keluarga	terlaksananya orientasi para kader (PPKBD dan sub PPKBD)	100%	100%	100%
Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB	Koordinasi pengelolaan program	meningkatnya kegiatan kemitraan dalam penggarapan program Kependudukan	80%	80%	100%
seksi Advokasi dan Penggerakan	pembentukan masyarakat peduli kb	cakupan kelompok KB yang diberi penyuluhan dan sosialisasi	80%	80%	100%

Data diatas menunjukkan pencapaian kinerja program dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan memenuhi target yang ditetapkan. **Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan KB** terdiri dari lima kegiatan dengan indicator program terbentuknya masyarakat peduli kb.

Masyarakat peduli KB terdiri dari kelompok kerja Pembantu penyuluh Keluarga berencana desa/kelurahan (PPKBD) dan sub PPKBD di lima kecamatan yang saat ini berjumlah 41 orang dan sub PPKBD berjumlah 266 orang dengan rasio satu kelurahan satu orang PPKBD dan dua orang sub PPKBD persatu kelurahan. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 16 kampung KB di 16 kelurahan yang ada.

**Tabel. 3.20.1. Capaian Kinerja Eselon III dan EselonIV Bidang KB**

<b>BIDANG KB</b>	<b>Program /kegiatan</b>	<b>Indikator prog/keg</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Kabid. KB</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	Persentase peserta kb aktif	85%	85%	100 %
<b>seksi Jaminan Pelayanan KB</b>	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Rasio kseptor kb yang dilayani	45%	45%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	pembinaan keluarga berencana	Cakupan kelompok KB yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	70%	70%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	Pelayanan KIE	cakupan kelompok masy.peduli KB yang diberi penyuluhan dan sosialisasi	100%	100%	100%
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	rapat kerja daerah program keluarga berencana	meningkatnya kegiatan kemitraan dalam penggarapan program KB	100%	100%	100%
<b>Kabid. KB</b>	<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	Cakupan Penyediaan Alat kontrasepsi dan obat untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%	65.60%	65.60%	100 %
<b>Kasi pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber-kb</b>	pelayanan konseling KB	cakupan Faskes/klinik KB yang dibina	100%	100%	100%
<b>seksi pengendalian dan pendistribusian Alkon</b>	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Cakupan sarana dan prasarana klinik pelayanan KB yang memenuhi standart	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>

Data diatas menunjukkan pencapaian kinerja program dibidang Keluarga Berencana memenuhi target yang ditetapkan. Indikator program keluarga berencana berupa menurunnya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dari pasangan usia subur umur 15-19 Tahun yang hanya mencapai 6,9 %. Adanya peningkatan Pencapaian kb aktif sebesar 82 % atau 24.718 akseptor dari pasangan usia subur sebesar 29.818. pencapaian ini ini dikarenakan intensifnya kegiatan pembinaan dan Konseling terhadap seluruh pasangan usia subur, terpenuhinya fasilitas Kb diseluruh faskes / klinik KB yang ada pada lima kecamatan.

**Tabel 3.20.2. Capaian Kinerja Eselon III dan EselonIV Bidang Ketahanan dan KK**

BIDANG KS	Program /kegiatan	Indikator prog/keg	Target	Capaian	Realisasi
Kabid.Ketahanan dan Kesga	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	Persentase angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	65.60%	65.60%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	Median usia kawin pertama wanita	20.60%	20.60%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga/ seksi ketahanan remaja	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>  Penyuluhan Penanggulangan bahaya Narkoba dan PMS di sekolah	Cakupan kelompok PIK-RR yang aktif	0	0	0
Kabid.Ketahanan dan Kesga/kasi ketahanan balita,anak dan lansia	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>  Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB yang mendapatkan pembinaan yang aktif	80%	80%	100%
Kabid.Ketahanan dan Kesga / kasi ketahanan balita,anak dan lansia	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>  Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Cakupan tenaga pendamping bina keluarga terlatih	80%	80%	100%
seksi ketahanan remaja	advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Cakupan klpk generasi berencana disekolah yang aktif	80%	80%	100%
seksi ketahanan remaja	memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	terlaksananya hari keluarga Nasional tk.Kota Bima Thn.2018	100%	100%	100%
seksi ketahanan remaja	pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan forum pusat informasi konseling remaja dan forum pelayanan KRRbagi klpk sebaya yang aktif	100%	100%	100%

seksi ketahanan remaja	kegiatan pendampingan pelayanan KRR bagi klpk Remaja dan klpk sebaya diluar sekolah	jumlah kelompok PIK-RR dan PIK Mahasiswa	100%	100%	100%
seksi ketahanan remaja	memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	terlaksananya hari keluarga Nasional	100%	100%	100%

Data diatas menunjukan tingkat capaian program dan kegiatan pada bidang KS mencapai 100%. Program dan kegiatan bidang ketanan dan kesejahteraan terutama melalui program / kegiatan pendirian pusat informasi dan konseling bagi remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para remaja, pembinaan terlaksananya kegiatan KIE tentang KRR dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan capaian sebesar 20.60%, telah berhasil menurunkan angka kelahiran pada remaja 65,50%. Untuk memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka program kb di kota bima telah dilaksanakan kegiatan hari keluarga nasional (harganas).

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 untuk mendukung sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 8 (delapan) program dengan 46 (empat puluh enam ) kegiatan, dan realisasi keuangan untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.21. Realisasi Anggaran**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7					
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	2.706.769.956	2.636.319.113	97,40	2.414.364.079,00

11	Belanja Barang	3.265.387.600	2.945.927.648	90,21	2.364.280.436,00
12	Belanja Hibah	552.840.000	0	0	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	103.952.000,00
14	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14)	5.972.157.556	5.582.246.761	93,47	4.882.596.515,00
15	<b>BELANJA MODAL</b>				
16	Belanja Tanah	0	0	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	984.704.000	980.704.000	99,60	491.261.000,00
18	Belanja Bangunan dan Gedung	136.000.000	131.852.000	96,95	292.475.000,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000	20.000.000	100	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20)	1.140.704.000	1.132.556.000	99,28	783.736.000,00
22	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
23	Belanja Tak Terduga	0	0	0,00	0,00
24	Jumlah Belanja Tak Terduga (23)	0	0	0,00	0,00
25	<b>JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24)</b>	7.112.861.556	6.714.802.761	94,40	5.666.332.515,00
26	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25)</b>	(7.112.861.556)	(6.714.802.761)		(5.666.332.515,00)
27	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26)</b>	(7.112.861.556)	(6.714.802.761)		(5.666.332.515,00)

### 3.2.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

#### a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA tahun 2019 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dianggarkan karena tidak memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah.

#### b. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung.

Secara umum Belanja tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 7.112.861.556,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.714.802.761,00 atau 94,40%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp398.058.795,00. Terjadi peningkatan realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 1.048.470.246,00) atau 15,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp 5.666.332.515,00. Hal ini dikarenakan meningkatnya penyerapan anggaran pada program pelayanan konseling yang berasal dari dana DAK untuk Biaya Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB).

**Tabel : 3.22. Belanja Tahun 2019**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Operasi	5.972.157.556	5.582.246.761	93,47	4.882.596.515,00
2.	Belanja Modal	1.140.704.000	1.132.556.000	99,28	783.736.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.112.861.556,00</b>	<b>6.714.802.761,00</b>	<b>94,40</b>	<b>5.666.332.515,00</b>

#### c. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 5.972.157.556 dan terealisasi sebesar Rp 5.582.246.761 atau 93,47%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 389.910795, 00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 4.882.596.515,00 atau 90,13%, maka realisasi Belanja Operasi tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar (Rp699.650.247) atau (14,32%). Belanja Operasi tahun 2019 terdiri dari :



**Tabel :3.23. Belanja Operasional**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Pegawai	2.706.769.956	2.636.319.113	97,40	2.414.364.079,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.712.547.600	2.501.820.648	92,23	2.364.280.436,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	552.840.000	444.107.000	80,33	103.952.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.972.157.556</b>	<b>5.582.246.761</b>	<b>93,47</b>	<b>4.882.596.515,00</b>

**1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 2.706.769.956,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.636.319.113 atau 97,39 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 70.450.843. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 2.414.364.079,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 221.955.034 atau sebesar 9,20% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.25. Belanja Pegawai**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>I.</b>	<b>Belanja Pegawai - Tak Langsung</b>				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.967.789.956	1.946.468.113	98,92	1.744.304.579,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	220.400.000	216.891.000	98,40	217.692.500,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Pegawai - Langsung</b>				
1.	Honorarium PNS	518.580.000	472.960.000	91,20	452.367.000,00
2.	Honorarium Non PNS	0	0	0,00	0,00
	<b>Jumlah (I+II)</b>	<b>2.706.769.956</b>	<b>2.636.319.113</b>	<b>97,40</b>	<b>2.414.364.079,00</b>

**2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp **2.706.769.956** dan terealisasi sebesar **2.636.319.113** atau **97,40 %**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp . 70.450.843. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp **2.414.364.079,00** maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 221.955.034 atau 9,20% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 3.26. BelanjaBarang dan Jasa**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	169.552.800	160.217.975		169.050.825,00
2.	Belanja Bahan/Material	25.566.200	24.307.500		33.009.400,00
3.	Belanja Jasa Kantor	321.120.000	276.506.453		277.759.584,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	156.130.000	143.388.686		130.549.780,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.719.000	30.337.000		31.477.000,00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000	1.500.000		500.000,00
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.220.000	39.185.000		52.720.000,00
8.	Belanja Makanan dan Minuman	395.500.000	366.814.500		238.082.000,00
9.	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0,00	0,00
10.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	49.500.000	49.500.000		0,00
11.	Belanja Perjalanan Dinas	478.639.600	470.340.034		472.776.347,00
13.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	880.425.000	792.675.000		846.900.000,00
14.	Belanja Hadiah	31.550.000	31.548.500		31.550.000,00
15.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	131.125.000	115.500.000		79.905.500,00
	<b>Jumlah</b>				<b>2.364.280.436,00</b>

**3) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial merupakan belanja barang (Hibah) yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga sehingga tidak diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Belanja Bantuan sosial untuk Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.552.840.000 dan direalisasi sebesar Rp. 444.107.000 atau 80,33 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 108.733.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.103.952.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Soaial menunjukkan peningkatan sebesar Rp 340.155.000 atau 327,22%.

**Tabel 3.27. Belanja Bantuan Sosial**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1.	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Pihak ketiga	552.840.000	444.107.000	80,33	103.952.000,00
	<b>Jumlah</b>	552.840.000	444.107.000	80,33	<b>103.952.000,00</b>

**b. Belanja Modal**

Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 1.140.704.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.132.556.000 atau 99,30 % dan sisa anggaran Rp.8.148.000. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. Rp.783.736.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2019 menunjukkan peningkatan sebesar Rp 348.820.000 atau 44,50%.

**Tabel 3.28 Belanja Modal**

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>A.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	984.704.000	980.704.000		
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	0	0	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	804.852.000	801.852.000		186.642.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100	278.306.000,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	169.852.000	168.852.000		0,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0	0	0	11.400.000,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0	0	0	14.913.000,00
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		984.704.000	980.704.000		<b>491.261.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan</b>				
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	136.000.000	131.852.000		292.475.000,00

	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
<b>JUMLAH</b>		136.000.000	131.852.000		292.475.000,00
<b>c.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	20.000.000	20.000.000	100	0
<b>1.</b>	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jaringan Distribusi	20.000.000	20.000.000	100	0
<b>JUMLAH</b>		20.000.000	20.000.000	00	
<b>Jumlah (A+B+C)</b>		<b>1.140.704.000</b>	<b>1.132.556.000</b>		<b>783.736.000,00</b>

**Tabel 3.29 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Anggaran SKPD DPPKB tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>669.962.400</b>	<b>646.090.853</b>	<b>96,44</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.468.000	39.032.000	98,90
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	63.700.000	56.232.093	88,28
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.400.000	27.797.686	74,33
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.020.000	55.320.900	95,35
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.566.000	5.566.000	100
6.	Penyediaan alat tulis kantor	32.679.300	32.679.300	100
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.220.000	31.777.500	98,63
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.475.000	22.475.000	95,74
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	53.887.500	53.700.000	99,65
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.320.000	8.610.000	83,43
11.	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000	13.000.000	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.226.600	299.900.374	99,89
<b>B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>1.194.392.700</b>	<b>1.181347.000</b>	<b>98,91</b>
1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	804.852.000	801.852.000	99,63
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	270.852.000	265.704.000	98,10
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	110.330.000	106.691.000	96,70
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.358.700	7.100.000	84,94

<b>C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>169.732.000</b>	<b>168.862.000</b>	<b>99,49</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169.732.000	168.862.000	99,49
<b>D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR</b>		<b>5.282.600</b>	<b>4.750.000</b>	<b>89,92</b>
1.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	5.282.600	4.750.000	89,92
<b>E.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>113.051.100</b>	<b>92.442.000</b>	<b>81,77</b>
1.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	11.054.550	10.750.000	97,25
2.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20.304.550	0	0
3.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA SKPD	57.387.450	57.387.450	100
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	24.304.550	24.304.550	100
<b>F. PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>		<b>2.236.552.400</b>	<b>2.017.764.910</b>	<b>90,22</b>
1.	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	226.342.700	217.118.200	95,92
2.	Pelayanan KIE	340.933.500	331.122.500	97,12
3.	Peningkatan perlindungan Hak REproduksi	20.380.000	20.380.000	100
4.	Promosi Pelayanan KHIBA	0	0	0
5	Pembinaan Keluarga Berencana	47.071.200	46.148.700	98,04
6	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	25.000.000	22.977.880	91,91
7	Pelayanan Konseling KB	1.471.973.000	1.380.017.630	93,75
8	Pengadaan/Pelayanan Sarana KB	104.852.000	0	0
<b>G.PROGRAM PENINGKATAN DAN KETAHANAN KESEJATERAAN KELUARGA</b>		<b>296.979.900</b>	<b>296.828.863</b>	<b>99,95</b>
1.	Advokasi dan KIE tentang KRR	19.570.600	19.570.600	100
2.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	211.570.600	211.408.963	99,93
3	Pengelolaan BKR	0	0	0
4	Pembinaan Kelompok Saka Kencana	0	0	0
5	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	12.954.800	12.954.800	100
6	Pendampingan Pelayanan KRR bagi Kelompok remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	0	0	0
7	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	0	0	0
8	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	40.189.700	40.189.700	100
9	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	12.704.800	12.704.800	100
10	UPPKS	0	0	0

<b>H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN KB</b>		<b>238.718.500</b>	<b>143.358.022</b>	94,14
1.	Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	58.748.500	24.601.100	41,88
2.	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	35.371.000	12.573.000	35,55
3.	Operasional Kader pendataan keluarga	29.906.400	7.200.000	24,08
4.	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	7.951.600	4.251.600	53,47
5.	Koordinasi pengelolaan program	106.741.000	94.732.322	88,75
6.	Penyusunan dan Penerbitan Produk Hukum Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	0	0	0

### **3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN:**

- a. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif; Pencapaian akseptor KB aktif tambahan , meningkatnya penggunaan kontrasepsi modern, serta menurunnya angka Drop Out/ Ketidak Kerlangsungan KB pada Tahun 2019 yang dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target propinsi dan Nasional menandakan tingginya kesadaran masyarakat terutamapasangan usia subur akan pentingnya program keluarga berencana yang pada akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal antara lain :
- Adanya kuantitas dan kualitas pelayanan KB yang semakin baik.
  - Adanya garis komando dan garis koordinasi yang jelas
  - Adanya pembagian tugas yang jelas di jajaran DPPKB .
  - Adanya penyediaan alat dan obat kontrasespsi yang selalu ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Klinik KB).
  - Adanya segmentasi sasaran yang jelas, sehingga mengetahui siapa dan dimana PUS yang belum ber-KB
  - Kemampuan dan kapasitas tenaga lini terdepan yaitu Penyuluh KB yang semakin baik,
  - Adanya kerjasama maupun dengan stakeholder (mitra kerja) yang ada seperti Kantor Kementerian Agama kota Bima, Penyuluh Agama, Dinas Kesehatan, Kepala KUA Kecamatan serta institusi-institusi Kelurahan yang ada seperti PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka ikut menyukseskan pengelolaan program keluarga berencana.

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan KS I, telah dilakukan pemberian bantuan modal, pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, serta BKL. Selaian itu pada tahun 2018 dilakukan orientasi BKB, BKR, BKL bagi kader dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan KS I. Dan melakukan advokasi/KIE kepada Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan LSM dalam rangka meningkatkan pencapaian program dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing kelurahan, sehingga program KB merupakan kebutuhan bagi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
- b. Presentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) belum dapat memenuhi target baik target kota maupun target Nasional (SPM) hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain :
- Aktifitas pendataan yang masih kurang maksimal
  - Jaringan pelayanan yang masih kurang
  - Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang belum optimal
  - Kurangnya anggaran sosialisasi/ promosi KB
  - Kurang optimalnya monitoring di lini lapangan

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan kelurahan sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB, serta dengan mengintensifkan pelayanan KIE serta promosi KB

### **3.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA**

Pemanfaatan sumberdaya yang ada pada DPPKB Kota Bima, dapat dikatakan efisien, karena dengan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sangat tinggi.

Dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik.

Realisasi anggaran DinasPP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 6.714.802.761,00,-** atau **94,40%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7.112.861.556,00**

Rincian Realisasi Anggaran yang telah digunakan Tahun 2019 dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.30. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN DPPKB  
TAHUN 2019**

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.188.189.956	2.163359.113	98,87
2	Belanja Langsung	4.924.671.600	4.551.443.648	92,42
JUMLAH				
1.	Kegiatan yang terhambat tidak ada.	-	-	-
JUMLAH		<b>7.112.861.556</b>	<b>6.714.802.761</b>	<b>94,40</b>

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Media ini juga dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan program pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga tahun 2019. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, maka pencapaian indikator kinerja bidang pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, empat dari lima indikator dapat memenuhi dan bahkan melampaui target yang ditetapkan dan hanya satu indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan .
2. Keberhasilan yang dimaksud di atas adalah besarnya capaian kinerja yang lebih besar dari target, baik itu target tahun 2019, target RPJMD maupun target nasional strategis.

Realisasi anggaran pada Badan PP dan KB Kota Bima Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 6.714.802.761,-** atau 94,40 % dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7.112.861.556**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kami buat, semoga bermanfaat, terima kasih.

